

Analisis Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng

Sri Wahyuni Nurzak¹, Harianto², Muhammad Rifki Nisardi

¹Ilmu Aktuaria, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bulukumba

²Ilmu Aktuaria, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bulukumba

³Ilmu Aktuaria, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Email : sriwahyuninurzak@gmail.com, harianto@umbulukumba.ac.id
muhammadrifkinisardi@umbulukumba.ac.id

Info Artikel	ABSTRACT
Keywords: community satisfaction, village fund management, simple linear regression and T test.	Management of village funds is a whole series of activities starting from the planning, implementation, administration, reporting stages, to the accountability stage of village funds which are carried out during the 1-year budget. This study aims to find out how the level of management of village funds influences community satisfaction in Rappoa Village, Pa'jukukang District, Bantaeng Regency. The sample used in this study was 92 respondents taken from the Rappoa village community. The data obtained is primary data which is the result of respondents' answers or questionnaires. The data analysis technique used in this study is simple linear regression. The results of this study indicate that there is an influence on village fund management on community satisfaction. This is proven based on the results of the T test, the calculation of the t_{count} test is 5.602 while the t_{table} is 1.661 at a significant level <0.05 so that it can be interpreted that village funds have an effect on community satisfaction and based on the coefficient of determination test obtained village funds explain 25.9% of the variable community satisfaction.
Kata kunci: Kepuasan masyarakat, pengelolaan dana desa, regresi linear sederhana dan uji T	ABSTRAK Pengelolaan dana desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan selama 1 tahun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 92 responden yang diambil dari masyarakat desa Rappoa. Data yang diperoleh adalah data primer yang merupakan hasil dari jawaban responden atau kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji T, perhitungan uji t_{hitung} sebesar

5,602 sedangkan pada t_{tabel} adalah 1,661 pada taraf signifikan $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dan berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh dana desa menjelaskan 25,9% dari variabel kepuasan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Keputusan ini merupakan bukti ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia, sekaligus sebagai cara untuk melindungi dan memperkuat desa agar lebih mandiri, sejahtera, dan demokratis. Pengelolaan keuangan yang ditinjau adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), yang mendukung dan melaksanakan rencana kewajiban yang ditetapkan dengan teknik desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Bagian (APBD) adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk kekuasaan yang dialihkan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk mendorong pengelolaan yang baik. *Good governance* (pemerintahan yang baik) meliputi ciri-ciri akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, daya tanggap, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta memiliki visi strategis. *Good governance*, seperti diungkapkan Agus Subroto, merupakan kerangka kelembagaan untuk memperkuat desa otonom, karena pada hakikatnya bersifat desentralisasi.

Pengelolaan dana desa di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa membutuhkan dana yang semakin berimbang untuk berperan lebih nyata dalam pembangunan daerah. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah terbitnya kebijakan dana desa yang lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur demi kepuasan masyarakat, seperti pembuatan jalan setapak untuk mempermudah akses jalan, penyediaan gazebo dengan layanan internet gratis, pembuatan lampu jalan di setiap dusun di Rappoa, pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa dan adapun bantuan yang didapatkan oleh masyarakat desa rappoa, seperti bantuan untuk masyarakat yang lanjut usia, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Bantuan Beasiswa Berprestasi. Kebijakan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk lebih fokus pada pembangunan fisik sehingga mempermudah aktifitas seluruh masyarakat. Dalam hal ini dapat mengubah masyarakat menjadi warga desa yang sejahtera dan dapat mewujudkan desa yang sesuai dengan harapan setiap warga desa. Dengan kebijakan pemerintah daerah Bantaeng mengenai pemanfaatan dana desa secara sempurna dengan memanfaatkan kebutuhan masing-masing desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Karena pengelolaan dana desa sangat penting untuk mendukung pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa harus mampu mengelola dan melaksanakan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola keuangan desa dan barang milik desa untuk memenuhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik mencakup semua bidang kehidupan. Dalam kehidupan bernegara, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengabdikan kepada negara, baik berupa peraturan dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam berbagai bidang (Andriani, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Pratiwi (2020), akuntansi dana desa sudah berjalan dengan baik disertai dengan sistemnya, partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik dan terdapat pengaruh akuntansi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut (Susliyanti dan Binawati, 2020), akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan cukup luas kepada desa, termasuk memberikan anggaran dana desa yang jumlahnya cukup besar. Dengan dana tersebut, sarana dan prasarana desa dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut jangan dilihat sebagai proyek dari luar, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari program "membangun rumah sendiri". Oleh

karena itu, pemerintah desa dan masyarakat harus mempertimbangkan manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa. Masyarakat dan pemerintah desa harus memahami bahwa manfaat pembangunan sarana dan prasarana desa tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tetapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Penelitian mengenai pengelolaan dana desa menjadi pokok utama untuk dilakukan mengingat desa merupakan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib dilakukan agar dapat membentuk suatu aktifitas yang berguna, bermanfaat dan memuaskan bagi masyarakat desa. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ini akan meneliti “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Desa Rappoa Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tempat lahir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Andriani (2021) desa adalah kesatuan penduduk yang sah dengan batas-batas wilayah, yang berhak menyesuaikan dan mengurus kepentingan penduduk setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diselenggarakan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, fokus dan lancar terutama dalam program kegiatan pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan sejahtera bagi masyarakat desa menurut (Kehik dan Mael, 2017).

Adapun unsur desa, dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur desa adalah komponen yang membentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah:

1. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
2. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
3. Pemerintahan, adalah suatu sistem tentang pemerintahan sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggungjawab kepada rakyat desa.
4. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah segala kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang diangkat oleh pemerintah yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara diarahkan pada bagian anggaran kementerian atau lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja kabupaten atau kota. Pelaksanaan kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah dibiayai dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Menurut Boedijono, Wicaksono & Puspita (2019) pengertian pengelolaan adalah sekumpulan kegiatan, pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan presiden nomor 43 pasal 93 tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) adalah proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan mekanisme perencanaan menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- i. Sekretaris desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala Desa.

- ii. Kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk diproses lebih lanjut.
- iii. Setelah itu, rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut akan diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
- iv. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa paling lambat 3 hari setelah disetujui kepada kepala desa/walikota untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan.
- v. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja setelah menerima rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila dalam waktu 20 hari kerja hasil evaluasi tidak diteruskan oleh bupati/walikota, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- vi. Jika kepala desa melakukan perbaikan paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi.
- vii. Apabila Bupati/walikota melaporkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan perbaikan paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi.
- viii. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
- ix. Pembuatan peraturan desa dan menyatakan berlakunya APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- x. Kepala desa menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah dibuat, dan setelah itu kepala desa bersama badan permusyawaratan desa mencabut peraturan desa yang dimaksud.
- xi. Dengan adanya mekanisme perencanaan diatas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali sesuai dengan peraturan yang telah ada.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Tahap pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk menjalankan APBDesa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun pada tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun pada tanggal 31 Desember. Mengambil tindakan yang berarti untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan untuk setiap kegiatan, yang direncanakan dengan cermat dan terperinci melalui perencanaan atau musrenbang (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018).

2. Penatausahaan

Penatausahaan adalah suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur untuk memperoleh informasi tentang keuangan yang secara khusus dilakukan oleh bendahara desa. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan atau laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Saat mengatur urusan keuangan desa, kepala desa menunjuk bendahara desa, bendahara desa harus diangkat sebelum awal tahun anggaran yang bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa (Mamelo, Kalangi, & Lambey, 2017).

3. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan dari kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya (Suwarno, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, hak dan kewajiban kepala desa dalam menjalankan tugasnya meliputi:

- a. Menyampaikan kepada bupati/walikota laporan pelaksanaan APBDesa, laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDesa, yang disampaikan paling lambat akhir bulan

Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun. Laporan tahunan, yang disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Setelah masa jabatan berakhir, menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada bupati/walikota.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Pertanggungjawaban keuangan desa diperlukan agar desa dapat memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang diminta dari mereka. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan pendanaan.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tentang pelaksanaan APBDesa harus disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode keuangan yang bersangkutan.

Kepuasan Masyarakat

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah tingkat perasaan seseorang setelah mengonsumsi produk atau jasa terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan yang diinginkannya (Siregar, 2018). Kepuasan masyarakat terhadap aparat desa sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Menurut Nugrahani (2019), “Kepuasan masyarakat merupakan tingkat perasaan atau pendapat seseorang yang berupa rasa senang, kecewa, puas atau tidak puas terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik dibandingkan dengan harapannya”. Dalam musyawarah desa masyarakat harus menyampaikan pendapat tentang alokasi dana desa untuk kegiatan apa, kemudian masyarakat sendiri yang harus mengikuti dan mengawasi kegiatan (Aisyah, 2020).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmenpan Nomor 25 tahun 2004).

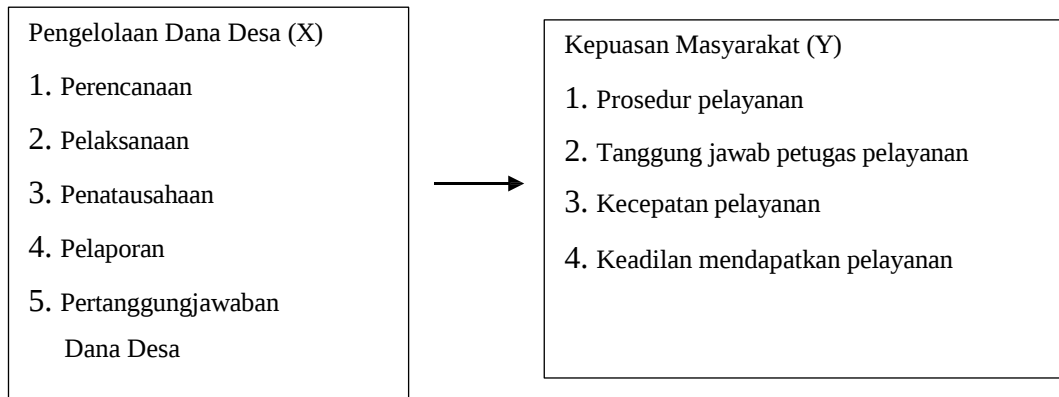
Indikator kepuasan masyarakat yang digunakan dalam alat pengukuran berdasarkan Kepmenpan Nomor 25 tahun 2004, terdapat 5 indikator pengukur indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan sebagai berikut:

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan langkah-langkah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan.
- c. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu penyelesaian layanan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- d. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani.
- e. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.

Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur desa.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini adalah untuk menguraikan atau mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi masukan antara variabel X dan variabel Y yang diteliti yaitu “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Rappoa Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng”. Dengan demikian, penulis memberikan batasan kerangka konseptual yaitu mengadakan penelitian mengenai pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat, yang dapat dilihat sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangka Konsep



4. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan rencana penelitian. Penelitian ini termaksud penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Rappoa Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini diambil dari data-data yang didapatkan di lapangan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Rappoa Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Adapun waktu pelaksanaan penelitian di kerjakan kurang lebih lima bulan yakni dari bulan Januari-Juni tahun 2023.

C. Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdiri dari pengelolaan dana desa sebagai variabel bebas (X) dan kepuasan masyarakat sebagai variabel terikat (Y).

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pengelolaan Dana Desa (X)	Pengelolaan dana desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dana desa, yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran.	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban
Kepuasan Masyarakat (Y)	Kepuasan masyarakat adalah adanya pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada perangkat desa dan adanya kepercayaan masyarakat terhadap tingkat perasaan atau pendapat.	1. Prosedur pelayanan 2. Tanggung jawab petugas pelayanan 3. Kecepatan pelayanan 4. Keadilan mendapatkan pelayanan 5. Kesopanan dan keramahan petugas.

D. Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan skala likert yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, menggunakan lima 5 alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1-5 dan menggunakan sejumlah skor 1-5 untuk keperluan analisis kuantitatif di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Adapun skor dari masing-masing alternatif jawaban ini diberikan skor dengan menggunakan pengukuran ordinal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang meliputi semua hasil perhitungan dan pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif dan pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek lengkap dan jelas (Nirmala 2018). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang berusia 17 tahun keatas sebanyak 1176 orang yang wajib memilih dalam pemilu.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017) menyebut sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Menurut (Triyono, 2018) untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, terdapat rumus bernama rumus Slovin yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (3.1)$$

Dimana: n = jumlah sampel di desa rappoa

N = jumlah populasi di desa rappoa

e = tingkat signifikan (10%)

Untuk sampel yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1176}{1 + 1176 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{1176}{1 + 1176 (0,01)}$$

$$n = \frac{1176}{12,76}$$

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 92 orang.

F. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli yaitu masyarakat desa rappoa dan turun langsung di lapangan atau tempat penelitian. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penulis.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Kuesioner

Penelitian yang dilakukan secara langsung dengan proses memberikan pernyataan serta jawaban secara tertulis kepada masyarakat Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari Desa

Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk menguji variabel bebas, dana desa (X) terhadap variabel terikat, kepuasan masyarakat (Y) yaitu:

- Mengumpulkan data
- Melakukan analisis deskriptif
- Melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang disebar.
- Melakukan uji asumsi klasik sebagai syarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear sederhana. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji linearitas dan uji heteroskedastisitas.
- Analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- Melakukan uji koefisien determinasi dan uji T.
- Selesai.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase %
Laki-laki	32	35%
Perempuan	60	65%
Total	92	100%

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng terdapat 92 orang responden yang terdiri dari 32 orang laki-laki dengan presentase sebesar 35% dan 60 orang perempuan dengan presentase sebesar 65%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dominan berjenis kelamin perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Adapun data berdasarkan usia responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase %
17-30	58	63%
31-40	20	22%
>40	14	15%
Total	92	100%

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa usia responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang berusia 17-30 tahun sebanyak 58 orang dengan presentase sebesar 63%, berusia 31-40 tahun sebanyak 20 orang dengan presentase sebesar 22%, dan yang paling sedikit berusia >40 tahun sebanyak 14 orang dengan presentase sebesar 15%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dominan berusia 17-30 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun data responden berdasarkan pendidikan terakhir di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase %
SMP/SMA	44	48%
S1/S2	40	43%
Lainnya	8	9%
Total	92	100%

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang memiliki pendidikan terakhir SMP/SMA sebanyak 44 orang dengan presentase sebesar 48%, S1/S2 sebanyak 40 orang dengan presentase sebesar 43% dan lainnya sebanyak 8 orang dengan presentase sebesar (9%). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sampel responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dominan memiliki pendidikan terakhir SMP/SMA.

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Pada bagian ini, analisis deskriptif data untuk diberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah satu variabel bebas (X) dan satu variabel terikat

(Y). Untuk mengungkap hasil penelitian berdasarkan variabel di atas, maka peneliti akan memaparkan data-data hasil penelitian berdasarkan hasil responden di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

1. Analisis Deskriptif Variabel Pengelolaan Dana Desa (X)

Adapun indikator pada variabel Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut:

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Penatausahaan
- Pelaporan
- Pertanggungjawaban

Tabel 4.5 Jawaban Responden Pengelolaan Dana Desa (X)

No	Item	<u>STS</u> 1	<u>TD</u> 2	<u>KS</u> 3	<u>S</u> 4	<u>SS</u> 5	Jumlah
1	Proses perencanaan pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat Desa Rappoa	0	0	0	14	78	92
2	Masyarakat Desa Rappoa terlibat dalam proses pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa	0	0	0	23	69	92
3	Pelaksanaan pembangunan Desa Rappoa						

	mengutamakan transparansi	0	0	0	16	76	92
4	Pelaksanaan pembangunan Desa Rappoa mengutamakan partisipasi	0	0	1	15	76	92
5	Pemerintah Desa Rappoa telah melakukan pelaksanaan data aset desa	0	0	0	39	53	92
6	Petugas pelaksanaan Desa Rappoa mencatat aset desa yang dilaksanakan melalui APBDesa	0	0	1	38	53	92
7	Kepala Desa Rappoa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada BPD dan masyarakat	0	0	0	19	73	92
8	Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa rappoa membuat laporan tertulis kepada BPD tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	0	0	0	21	71	92
9	Kepala Desa Rappoa menyampaikan laporan pertanggung Jawaban pelaksanaan APBDesa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran	0	0	0	18	74	92
10	Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa Rappoa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	0	0	0	17	75	92

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2023

Dari hasil Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa (X) pada Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah sebagai berikut:

- 1). Pernyataan pertama yaitu "Proses perencanaan pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat Desa Rappoa", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 78 orang, menjawab setuju sebanyak 14 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 2). Pernyataan kedua yaitu "Masyarakat Desa Rappoa terlibat dalam proses pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 69 orang, menjawab setuju sebanyak 23 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 3). Pernyataan ketiga yaitu "Pelaksanaan pembangunan Desa Rappoa mengutamakan transparansi", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 76 orang, menjawab setuju sebanyak 16 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 4). Pernyataan keempat yaitu "Pelaksanaan pembangunan Desa Rappoa mengutamakan partisipasi", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 76 orang, menjawab setuju sebanyak 15 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang.
- 5). Pernyataan kelima yaitu "Pemerintah Desa Rappoa telah melakukan pelaksanaan data aset desa", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 53 orang, menjawab setuju sebanyak 39 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 6). Pernyataan keenam yaitu "Petugas pelaksanaan Desa Rappoa mencatat aset desa yang dilaksanakan melalui APBDesa", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 53 orang, menjawab setuju sebanyak 38 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang.

- 7). Pernyataan ketujuh yaitu “Kepala Desa Rappoa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada BPD dan masyarakat”, dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 73 orang, menjawab setuju sebanyak 19 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
 - 8). Pernyataan kedelapan yaitu “Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa Rappoa membuat laporan tertulis kepada BPD tentang penyelenggaraan pemerintahan desa”, dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 71 orang, menjawab setuju sebanyak 21 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang
 - 9). Pernyataan kesembilan yaitu “Kepala Desa Rappoa menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran”, dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju 74 orang, menjawab setuju sebanyak 18 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
 - 10). Pernyataan kesepuluh yaitu “Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa Rappoa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan”, dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 75 orang, menjawab setuju sebanyak 17 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
1. Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Masyarakat (Y)
Adapun indikator pada variabel Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:
 - a. Prosedur pelayanan
 - b. Tanggung jawab petugas pelayanan
 - c. Kecepatan pelayanan
 - d. Keadilan mendapatkan pelayanan
 - e. Kesopanan dan keramahan petugas

Tabel 4.6 Jawaban Responden Kepuasan Masyarakat (Y)

No	Item	STS	TD	KS	S	SS	Jumlah
		1	2	3	4	5	
1	Prosedur pelayanan di kantor Desa Rappoa sudah efektif	0	0	1	18	73	92
2	Adanya kemudahan dalam tahapan pelayanan Desa Rappoa dilihat dari segi kesederhanaan alur pelayanan	0	0	0	16	76	92
3	Penanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan di kantor Desa Rappoa sudah efektif	0	0	0	20	72	92
4	Petugas pelayanan Desa Rappoa melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab	0	0	0	18	74	92
5	Cepatnya pelayanan sudah dapat dinikmati oleh semua masyarakat Desa Rappoa	0	0	0	29	63	92
6	Kecepatan pelayanan di desa dapat menunjang kehidupan masyarakat Desa Rappoa dengan sejahtera	0	0	1	27	64	92
7	Adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Rappoa dan tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan	0	0	0	26	66	92

8	Keadilan mendapatkan pelayanan dilakukan dengan teratur agar masyarakat Desa Rappoa merasakan kenyamanan	0	0	1	26	65	92
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas menciptakan kepuasan terhadap pelayanan di Desa Rappoa	0	0	0	25	67	92
10	Petugas desa melakukan pelayanan dengan sopan dan ramah agar masyarakat Desa Rappoa nyaman atas pelayanan yang diberikan	0	0	0	22	70	92

Sumber: Hasil Olah Data Primer 2023

Dari hasil Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Kepuasan Masyarakat (Y) di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yaitu:

- 1). Pernyataan pertama yaitu "Prosedur pelayanan di kantor Desa Rappoa sudah efektif", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 75 orang, menjawab setuju sebanyak 18 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang.
- 2). Pernyataan kedua yaitu "Adanya kemudahan dalam tahapan pelayanan Desa Rappoa dilihat dari segi kesederhanaan alur pelayanan", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 76 orang, menjawab setuju sebanyak 16 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang.
- 3). Pernyataan ketiga yaitu "Penanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan di kantor Desa Rappoa sudah efektif", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 72 orang, menjawab setuju sebanyak 20 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 4). Pernyataan keempat yaitu "Petugas pelayanan Desa Rappoa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 74 orang, menjawab setuju sebanyak 18 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 5). Pernyataan kelima yaitu "Cepatnya pelayanan sudah dapat dinikmati oleh semua masyarakat Desa Rappoa", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 63 orang, menjawab setuju sebanyak 29 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 6). Pernyataan keenam yaitu "Kecepatan pelayanan di desa dapat menunjang kehidupan masyarakat Desa Rappoa dengan sejahtera", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 64 orang, menjawab setuju sebanyak 27 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang.
- 7). Pernyataan ketujuh yaitu "Adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Rappoa dan tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 66 orang, menjawab setuju sebanyak 26 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 8). Pernyataan kedelapan yaitu "Keadilan mendapatkan pelayanan dilakukan dengan teratur agar masyarakat Desa Rappoa merasakan kenyamanan", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 65 orang, menjawab setuju sebanyak 26 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 1 orang.
- 9). Pernyataan kesembilan yaitu "Kesopanan dan Keramahan Petugas menciptakan kepuasan terhadap pelayanan di Desa Rappoa", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 67 orang, menjawab setuju sebanyak 25 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.
- 10). Pernyataan kesepuluh yaitu "Petugas desa memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah agar masyarakat Desa Rappoa nyaman atas pelayanan yang diberikan", dengan jumlah responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 70 orang, menjawab setuju sebanyak 22 orang, dan menjawab kurang setuju sebanyak 0 orang.

C. Uji Instrumen Penelitian

Suatu penelitian dianggap resmi apabila ketentuan penelitian tersebut memenuhi standar uji validitas dan reliabilitas. Penelitian juga harus memiliki standar objektif, sistematis serta data yang valid. Untuk mendapatkan data yang benar, perlu dilakukan pengecekan validitas dan reliabilitas sebagai berikut.

1. Uji Validitas

Data penelitian ini valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu nilai $df = N-2$ dan dalam penelitian ini $N = 92$ dan rumus $df = 92-2 = 90$. Jadi nilai r_{tabel} penelitian ini untuk $df 92 = 0,205$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil dari uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Butir Pernyataan Nomor	Validitas		Keterangan
			r_{hitung}	r_{tabel}	
1.	Pengelolaan Dana Desa	X1	0,346	0,205	VALID
		X2	0,431	0,205	VALID
		X3	0,470	0,205	VALID
		X4	0,459	0,205	VALID
		X5	0,699	0,205	VALID
		X6	0,748	0,205	VALID
		X7	0,520	0,205	VALID
		X8	0,560	0,205	VALID
		X9	0,450	0,205	VALID
		X10	0,491	0,205	VALID
2.	Kepuasan Masyarakat	Y1	0,597	0,205	VALID
		Y2	0,640	0,205	VALID
		Y3	0,520	0,205	VALID
		Y4	0,487	0,205	VALID
		Y5	0,646	0,205	VALID
		Y6	0,572	0,205	VALID
		Y7	0,616	0,205	VALID
		Y8	0,608	0,205	VALID
		Y9	0,493	0,205	VALID
		Y10	0,501	0,205	VALID

Sumber: Output SPSS 24, data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh hasil uji validitas dimana nilai dari $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu sebesar 0,205. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana alat ukur konsisten digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Nilai Cronbach's	Nilai	Status
	Alpha	Batas	
Pengelolaan Dana Desa (X)	0,718	0,7	Reliabel
Kepuasan Masyarakat (Y)	0,768	0,7	Reliabel

Sumber: Output SPSS 24, data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil uji reliabilitas variabel pengelolaan dana desa adalah $0,718 > 0,7$ terbukti reliabel, dan variabel kepuasan masyarakat adalah $0,768 > 0,7$ terbukti reliabel. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sugiyono, 2017) bahwa suatu penelitian dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,7$.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linear sederhana dalam menganalisis telah memenuhi asumsi klasik. Model regresi linear sederhana akan lebih tepat digunakan apabila memenuhi asumsi klasik berikut:

a. Uji Normalitas

Dasar pengambilan keputusan *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

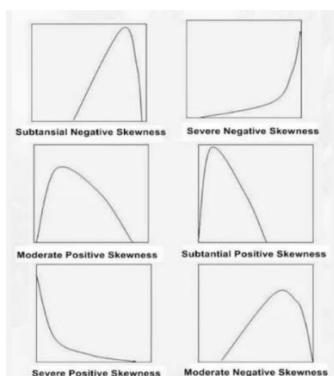
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas (Uji Awal)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,09900337
Most Extreme Differences	Absolute	0,110
	Positive	0,110
	Negative	-0,101
Test Statistic		0,110
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,008 ^c

Sumber:
Output SPSS
24, data
diolah 2023
Dari
Tabel 4.9
dengan N =
92 data dapat
diketahui
bahwa nilai
signifikansi
Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan nilai 0,008 yang berarti data belum berdistribusi dengan normal, karena nilai signifikannya masih dibawah 0,05. Setelah itu yang dilakukan adalah dengan mentransformasi data. Transformasi dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

- 1) Tahapan pertama adalah menentukan kecondongan dari data histogram. Terdapat beberapa tipe kecondongan data, dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Ghozali, 2016 Gambar 4.3 Jenis Kecondongan Data

2) Tahapan kedua adalah menentukan bentuk transformasi sesuai dengan bentuk grafik pada tahap pertama. Berikut bentuk-bentuk transformasi data:

Tabel 4.10 Bentuk-Bentuk Transformasi

Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi
Moderate Positive Skewness	SQRT (x) atau akar kuadrat
Substansial Positive Skewness	LG10 (x) atau logaritma 10 atau LN
Severse Positive Skewness dengan bentuk L	1/x atau inverse
Moderate Negative Skewness	SQRT (k-x)
Substansial Negative Skewness	LG10 (k-x)
Severse Negative Skewness	1/(k-x)

Sumber: Ghozali, 2016

Berdasarkan identifikasi histogram pada Gambar 4.3, data untuk penelitian ini termasuk dalam kategori grafik histogram *Substansial Negative Skewness*. Untuk memperoleh data yang normal, maka data pada Lampiran 6 untuk bagian data histogram uji normalitas di transformasi menggunakan bentuk LG10 (k-x) di SPSS. Berikut ini dapat dilihat hasil transformasi data uji normalitas setelah di transformasi:

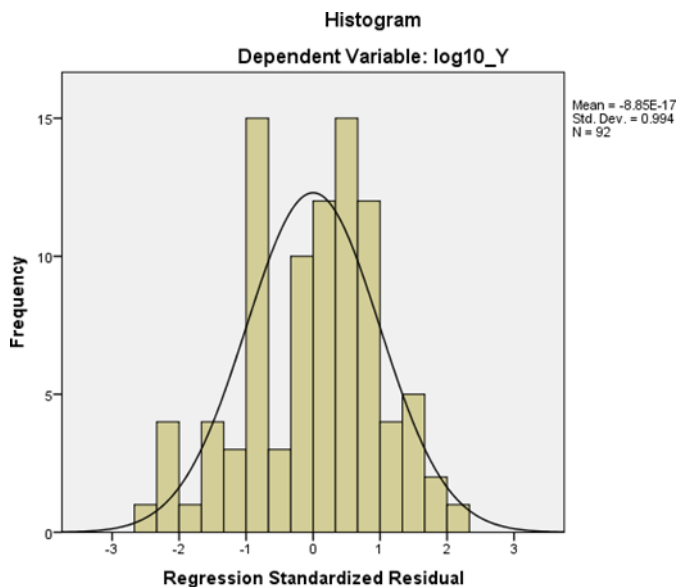
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas (Uji Setelah Transformasi)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized
		Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,28539676
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,063
	Negative	-0,089
Test Statistic		0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,068 ^c

Sumber: Output SPSS 24, data diolah 2023

Dari Tabel 4.11, diketahui data $N = 92$, Nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* diatas menunjukkan nilai 0,068 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data diatas sudah berdistribusi dengan normal. Selain dengan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, uji normalitas juga di uji dengan histogram untuk mengetahui bahwa data berdistribusi dengan normal atau tidak. Distribusi normal akan

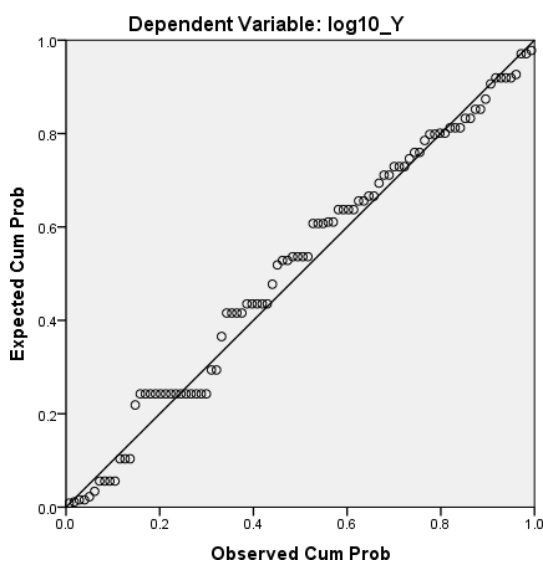
membentuk kurva menggunung. Berikut ini hasil histogram:



Gambar 4.4 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas

Dari Gambar 4.4 Hasil uji normalitas tersebut menghasilkan bentuk kurva menggunung maka dapat dikatakan bahwa pola berdistribusi normal. Selain dengan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan histogram, uji normalitas juga di uji dengan grafik untuk mengetahui bahwa data berdistribusi dengan normal atau tidak. Distribusi normal akan membentuk garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti data sesungguhnya. Berikut ini hasil analisis grafik:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.5 Grafik Normal Plot Hasil Uji Normalitas

Dari hasil Gambar 4.5 Grafik Normal Plot Hasil Uji Normalitas terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Pengambilan keputusan uji linearitas yaitu jika nilai signifikan *Deviation from Linearity* > 0,05 maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat dan jika nilai signifikan *Deviation from Linearity* < 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil dari perhitungan uji linearitas menggunakan SPSS 24 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
LG10_Y *	Between	Combined	3,112	9	0,346	4,118	0,000
LG10_X	Groups	Linearity	2,584	1	2,584	30,782	0,000
		Deviation from Linearity	0,527	8	0,066	0,785	0,617
	Within Groups		6,885	82	0,084		
	Total		9,997	91			

Sumber: Output SPSS 24, data diolah 2023

Dari Tabel 4.12 uji linearitas diperoleh nilai *Deviation from linearity* menunjukkan nilai signifikansi 0,617 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi linear sederhana. Pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser yaitu jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan begitu sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,395	0,378		1,046	0,298
	Pengelolaan Dana Desa	0,004	0,008	0,046	0,442	0,660

Sumber:
Output
SPSS 24,
data diolah
2023

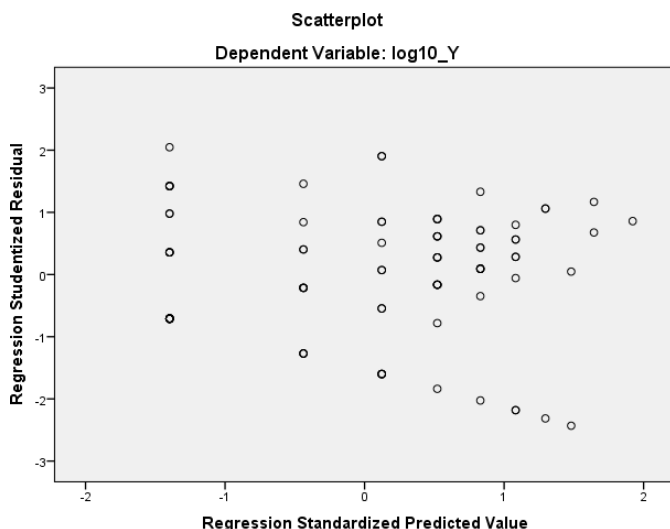
a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Dari
Tabel 4.13
Hasil dari

uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser diperoleh nilai signifikan yaitu 0,660 yang berarti lebih

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan. Selain dengan uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser juga di uji dengan grafik scatterplot, dengan pengambilan keputusan yaitu titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Apabila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.6 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dengan melihat Gambar 4.6 grafik scatterplot diatas, terlihat titik- titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah suatu metode untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan terikat. Data yang diperoleh dari analisis perhitungan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	0,200	0,052		3,880	0,001
Pengelolaan Dana Desa	0,537	0,096	0,508	5,600	0,000

a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat

Sumber: Output SPSS 24, data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4.14 dijelaskan nilai konstanta (a) adalah 0,2 sedangkan nilai koefisien pengelolaan dana desa (X) adalah 0,537, sehingga persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y^* = a + bX^*$$

$$Y^* = 0,2 + 0,537 X^* \quad (4.1)$$

- 1) Nilai konstanta regresi pada persamaan (4.1) adalah sebesar 0,2. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas (Pengelolaan Dana Desa) bernilai 0 ($X = 0$), maka kepuasan masyarakat (Y) akan tetap bernilai 0,2 satuan.
- 2) Berdasarkan hasil uji regresi pada persamaan (4.1) diperoleh koefisien regresi pengelolaan dana desa sebesar 0,537 pernyataan bahwa jika pengelolaan dana desa mengalami kenaikan satu satuan

- 3) maka kepuasan masyarakat akan mengalami peningkatan sebesar 0,537 satuan. Koefisien regresi sederhana bernilai positif, sehingga dapat dikatakan pengelolaan dana desa untuk kepuasan masyarakat bernilai positif.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut tabel pengujian koefisien determinasi (R^2) yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,508 ^a	0,259	0,250	0,28698
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Dana Desa				
b. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat				

Berdasarkan Tabel 4.15, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *R-Square* yaitu sebesar 0,259 (25,9%), artinya kemampuan variabel bebas dalam penelitian ini mempengaruhi variabel terikat sebesar 25,9%, sedangkan sisanya sebesar 74,1% ($1 - 0,259$) dijelaskan oleh variabel selain variabel bebas dalam penelitian.

f. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji hubungan yang signifikan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Adapun hasil uji T pada persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,052		3,881	0,000
	Pengelolaan Dana Desa	0,537	0,096	5,602	0,000
a. Dependent Variable: Kepuasan Masyarakat					

Berdasarkan Tabel 4.16, hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< 0,05$. Dari hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar 5,602 dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu 1,661 dengan taraf signifikan $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menguji pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dengan hipotesis di duga dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t_{hitung} sebesar 5,602 sedangkan pada t_{tabel} adalah 1,661 pada taraf signifikan $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Adapun persamaan regresi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) adalah $Y^* = 0,2 + 0,537 X^*$, nilai konstanta adalah 0,2 nilai ini menunjukkan bahwa jika pengelolaan dana desa bernilai 0 ($X = 0$), maka kepuasan masyarakat (Y) akan tetap bernilai 0,2 dan untuk nilai koefisien regresi pengelolaan dana desa (X) adalah 0,537, jika pengelolaan dana desa mengalami kenaikan satu satuan maka kepuasan masyarakat akan mengalami peningkatan sebesar 0,537 satuan. Dari persamaan regresi tersebut dilihat bahwa koefisien regresi bernilai positif, yang dapat diartikan

semakin besar nilai X maka semakin besar pula nilai Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang berbanding lurus antara variabel X dan variabel Y. Namun, untuk nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh dana desa menjelaskan 25,9% dari variabel kepuasan masyarakat sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Andriani, 2021) analisis pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, yang menunjukkan pengelolaan dana desa sudah memenuhi Kepuasan Masyarakat di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. Hasil ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2020) pengaruh akuntansi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh akuntansi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hasil observasi yang didapatkan menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan dana desa memberikan kepuasan masyarakat terhadap manfaat dan perubahan untuk Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat di Desa Rappoa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Dari hasil yang di peroleh dari uji T di dapatkan bahwa dana desa berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Hubungan pengelolaan dana desa dan kepuasan masyarakat dinyatakan dalam persamaan regresi $Y^* = 0,2 + 0,537 X^*$. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh dana desa menjelaskan 25,9% dari variabel kepuasan masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis yaitu berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini yaitu hanya 25,9% hal ini dapat mempertimbangkan variabel yang lain selain variabel dana desa. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pembangunan infrastruktur atau pelayanan desa sebagai variabel bebas dan bagi penelitian selanjutnya disarankan agar dapat benar-benar memahami langkah-langkah model regresi linear sederhana supaya memudahkan untuk meneliti dan mendapatkan hasil yang maksimal.

REFERENSI

- Aisyah, A. S. 2020. *Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangnga Kec.Bola Kab.Wajo*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Andriani, F. 2021. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara* . Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Boedijono, Wicaksono, G. & Puspita, Y. 2019. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*. Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(1), 9 – 20.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program IBM SPSS 23*. (Bth ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanief, N. Y. dan Himawanto, W. 2017. *Statistik Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hulu, Y. Harahap, R. H. & Nasution, M. A. 2018. Pengelolaan Dana Desa salad Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial*, 10 (1) : 146-154.
- Kehik dan Mael. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Agrimor 2(4), 59-62
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 25 Tahun 2004

- Mamelo, R. Y. G. Kalangi, L. & Lambey, L. 2017. *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur*, Kota Kotamobagu.
- Nirmala. 2018. *Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana dan Prasarana Masyarakat di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*.
- Nugrahani, M. C. 2019. *Kepuasan Masyarakat Desa Pada Pelayanan Administrasi Di Desa Bakalrejo Kec. Susukan Kab.Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 pasal 68 ayat 1 huruf c Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 43 pasal 93 Tahun 2014.
- Pratiwi, Y. N. 2020. Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*. Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Bandung.
- Santoso, S. 2019. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siregar, F. A. 2018. Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bonio Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN*. Fisip. Universitas Dharmawangsa Medan.
- Siregar, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, edisi tiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susliyanti, D. E. dan Binawati, E. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vo.11, No.1, Juni 2020, 1-12.
- Suwarno. 2019. Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongkok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, Vol.6 No.1, Juni 2019, hal.25-37.
- Triyono, A. 2018. *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Universitas Halu Oleo, 1-10.
- Undang-Undang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
- Yabbar, R. dan Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya : Penerbit Pustaka.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2017. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat: Jakarta.

